

ABSTRAK

Terdapat pertentangan pengaturan likuidasi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang menimbulkan konflik kelembagaan dalam likuidasi bank. Pertentangan mengenai antar kelembagaan inilah yang menyebabkan belum terselesaikannya tanggung jawab kepada sebagian nasabah BPR Bungbulang Garut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam likuidasi bank yang berbentuk Perusahaan Daerah serta menganalisis dan mengetahui tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap penanganan nasabah bank berbentuk Perusahaan Daerah yang dilikuidasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif serta Teknik Kesimpulan Data menggunakan kesimpulan data induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan likuidasi bank PD BPR Bungbulang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan memiliki kewenangan yang lebih luas sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun termasuk pemerintah terkecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang LPS. Lembaga Penjamin Simpanan dalam proses likuidasi bank gagal memiliki kewenangan untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Lembaga Penjamin Simpanan hanya akan membayar klaim penjaminan terhadap simpanan yang layak bayar. Bentuk tanggung jawab moril LPS terhadap nasabah PD BPR Bungbulang yang dananya dihimpun pada masa pengawasan khusus Bank Indonesia ini adalah dengan cara mempercepat proses likuidasi yang berjalan agar nasabah dapat dengan segera menerima kembali uangnya.

Kata Kunci: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Likuidasi, Perusahaan Daerah

ABSTRACT

There is a conflict in the regulation of liquidation as contained in Act Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (LPS Law) with Act Number 5 of 1962 concerning Regional Government Enterprises which causes institutional conflicts in bank liquidation. This inter-institutional conflict has caused unresolved responsibilities to some BPR Bungbulang Garut customers.

This study aims to analyze and determine how the authority of the Deposit Insurance Agency in the liquidation of banks in the form of regional companies works and to analyze and determine the position and responsibilities of the Deposit Insurance Agency to the handling of bank customers in the form of liquidated Regional Companies. This research used normative legal research. The research specifications used analytical descriptive. The methods of data collection used the examination of secondary data that was obtained through literature studies. The methods of data analysis used a qualitative analysis method and the Data Conclusion Technique was the inductive data conclusion.

The results show that the implementation of the Regional Company bank liquidation PD BPR Bungbulang agrees with Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation. The Deposit Insurance Corporation has a broader authority so that it cannot be intervened by any party including the government except for matters that are clearly stated in the LPS Law. The Deposit Insurance Corporation in the process of bank liquidation fails to have the authority to take over and carry out all the rights and the authority of shareholders, including the rights and the authority of the General Meeting of Shareholders (GMS). The Deposit Insurance Corporation will only pay insurance claims towards the deposits that are eligible to pay. The LPS's moral responsibility towards PD BPR Bungbulang customers whose funds collected during the special supervision period of Bank Indonesia is to accelerate the liquidation process so that the customers can immediately receive their money back.

Keywords: *Deposit Insurance Corporation (LPS), Liquidation, Regional Companies*